

12-31-2013

PREFERENSI MANAJEMEN LABA AKRUAL ATAU MANAJEMEN LABA RIIL DALAM AKTIVITAS TAX SHELTER

Ira Geraldina
STIE Banking School, geraldina.ira@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

Recommended Citation

Geraldina, Ira (2013) "PREFERENSI MANAJEMEN LABA AKRUAL ATAU MANAJEMEN LABA RIIL DALAM AKTIVITAS TAX SHELTER," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 10: Iss. 2, Article 5.

DOI: 10.21002/jaki.2013.11

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol10/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 10 Nomor 2, Desember 2013

PREFERENSI MANAJEMEN LABA AKRUAL ATAU MANAJEMEN LABA RIIL DALAM AKTIVITAS *TAX SHELTER*

Ira Geraldina

Program Studi Akuntansi STIE Indonesia Banking School
geraldina.ira@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of accrual or real earnings management on the possibility of companies involved in tax shelter activities by using Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (notice of tax deficiency) as a proxy to measure the tax shelter. By using a sample of companies who received Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (notice of tax deficiency) in manufacturing industry and listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2001-2010, this study finds that the company tends to favor accrual earnings management for decreasing possibility of aggressive tax shelter activities. This finding is not supporting the hypothesis. Real earnings management via abnormal operating cash flows and abnormal discretionary production increasing possibility of aggressive tax shelter activities. Both findings are supporting the hypothesis. This study also finds that both practices of accrual earnings management or real earnings management have substitute effect in explaining the possibility of companies involved in tax shelter activities.

Keywords: *tax shelter, notice of tax deficiency, tax penalty, accrual earnings management, real earnings management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba akrual atau manajemen laba riil terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* dengan menggunakan sanksi pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas *tax shelter*. Dengan menggunakan sampel perusahaan yang menerima dan mendapatkan ketetapan final SKPKB pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010, hasil penelitian menunjukkan perusahaan cenderung menggunakan manajemen laba akrual untuk menurunkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan *tax shelter*. Temuan tersebut tidak sesuai dengan dugaan penelitian. Temuan yang sesuai dengan dugaan penelitian adalah manajemen laba riil melalui diskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan *tax shelter*. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan manajemen laba akrual atau riil dalam aktivitas *tax shelter* dapat saling bersubstitusi.

Kata kunci: *tax shelter, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), sanksi pajak, manajemen laba akrual, manajemen laba riil.*

PENDAHULUAN

Aktivitas *tax shelter* diklaim merupakan salah satu bentuk biaya keagenan karena aktivitas tersebut dapat mendorong inefisiensi organisasi yang diakibatkan oleh beragam masalah insentif perusahaan (manajer) yang melakukan *tax shelter* (Shackelford

dan Shevlin 2001). Melalui modus pembebanan biaya fiktif, *hedging* fiktif dengan *backdated transaction*, dan *transfer pricing* melalui *paper company* di luar negeri, Asian Agri Group (AAG) harus menanggung inefisiensi. AAG diwajibkan membayar dua kali lipat dari *tax saving* yang berasal dari *tax shelter* yang dilakukannya selama tahun

2002-2005. Putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2013 memerintahkan AAG membayar pajak terutang sebesar Rp 2,5 triliun. Jumlah tersebut sebesar dua kali pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 perusahaan yang tergabung di dalam grup tersebut. Untuk membayar sanksi pajak di atas, AAG menggunakan seluruh sumber dananya, baik internal maupun eksternal (utang). Akibat putusan MA di atas, aset AAG bahkan sempat diblokir oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat dua *trade off* dalam penentuan sampel penelitian yang membahas mengenai *tax shelter*. Pertama, potensi bias sampel penelitian (*potential selection bias*). Penelitian dihadapkan pada *trade off* saat mengidentifikasi perusahaan yang terlibat aktivitas *tax shelter* dengan cara hanya memilih perusahaan yang secara formal terbukti bersalah dan dikenakan sanksi hukum atau hanya perusahaan yang terungkap melakukan transaksi tertentu yang terkategori dalam aktivitas *tax shelter* menurut ketentuan yang berlaku. Pilihan tersebut memiliki konsekuensi pada masalah yang kedua, yaitu penggunaan salah satu dari kedua cara identifikasi *tax shelter* tersebut dapat bersifat endogen. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu kemudian terlibat dalam aktivitas *tax shelter* atau sebaliknya, perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak, karena suatu alasan dapat terjerumus dalam aktivitas *tax shelter*. Oleh karena itu, bisa terjadi perusahaan yang terindikasi melakukan *tax shelter* adalah bukan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak hampir pada seluruh aspek perpajakan apabila menggunakan definisi *tax shelter* yang bersifat umum. Dengan kata lain, dapat saja terjadi pelanggaran terhadap transaksi tunggal namun belum tentu mencerminkan perilaku penghindaran pajak perusahaan secara menyeluruh.

Hal ini dapat terjadi pada perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Dalam upaya melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan membuka kantor cabang yang berkedudukan di negara-negara *tax haven* dan kemudian melakukan *transfer*

pricing. Selama *transfer pricing* ini dilakukan dengan harga yang wajar, maka perusahaan tidak terkategori melakukan *tax shelter*.

Namun, adakalanya perusahaan mendirikan kantor cabang penjualan di luar negeri karena pertimbangan bisnis murni atas permintaan pasar. Ketidakhahaman perusahaan mengenai ketentuan perpajakan, diantaranya mengenai kesepakatan harga transfer yang ditetapkan regulator perpajakan, dapat menyebabkan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* apabila menyalahi ketentuan yang berlaku.

Dengan kata lain, penelitian sebaiknya menggunakan pengukuran yang lebih spesifik dalam mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Kedua hal tersebut memberikan tantangan bagi penelitian pada area *tax shelter* untuk dapat mengidentifikasi dengan jelas definisi dan identitas perusahaan yang melakukan *tax shelter*.

Frank et al. (2009) dan Wilson (2009) menggunakan model Graham dan Tucker (2006) untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter* dan menemukan hubungan yang positif antara kegiatan *tax shelter* dengan agresivitas pelaporan keuangan. Graham dan Tucker (2006) menggunakan *database* internal regulator perpajakan (IRS/*Internal Revenue Service*) untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter*; yaitu mereka yang dinyatakan pemerintah menggunakan transaksi yang tidak diperkenankan oleh hukum, menerima pernyataan kurang bayar pajak dari pemerintah atau keduanya.

Kim et al. (2011) menggunakan tiga proksi ukuran penghindaran pajak yang salah satunya adalah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak ekstrim sebagai proksi untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan *tax shelter*¹. Kim et al. (2011) menggunakan nilai prediksi model Wilson (2009) untuk mengukur tingkat *tax sheltering*

¹ Dua proksi lainnya adalah *long-run cash effective tax rate* dan nilai ekstraksi analisis faktor dari tiga ukuran *book-tax differences (BTDFACTOR)*.

perusahaan. Semakin besar tingkat *tax sheltering*, semakin besar tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hanlon dan Joel (2009) menggunakan informasi publik yang mengabarkan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter* untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat aktivitas *tax shelter*. Samingun (2012) menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan regulator perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk tujuan pajak. Samingun (2012) menggunakan proksi sanksi pajak yaitu koreksi bersih pajak terutang ditambah sanksi pajak akibat dikeluarkannya SKP tersebut yang diperhitungkan pada rekonsiliasi fiskal untuk mengukur manajemen laba untuk tujuan pajak. Koreksi bersih yang dimaksud adalah hasil penjumlahan dari pokok pajak yang masih terutang dan sanksi pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), serta selisih antara nilai restitusi (pengembalian) pajak yang diajukan perusahaan dengan jumlah restitusi yang diterima perusahaan (Samingun 2012).

Penelitian Samingun (2012) menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang di dalamnya terdapat koreksi fiskal baik untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen pajak. Penelitian ini mengembangkan penelitian Samingun (2012) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yang teridentifikasi melakukan aktivitas *tax shelter*. Dibandingkan dengan penelitian Samingun (2012), dari segi ruang lingkup, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas karena hanya menguji penggunaan manajemen laba perusahaan (akrual dan riil) dalam manajemen pajak spesifik (*tax shelter*) dan tidak menguji determinan dari *tax shelter* dan dampaknya bagi investor di pasar modal. Namun, penelitian ini menggunakan proksi spesifik dalam mengukur manajemen pajak, yaitu *tax shelter* yang tidak digunakan pada penelitian Samingun (2012).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh manajemen laba dengan sanksi pajak kurang bayar sebagai proksi untuk mengukur *tax shelter* terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Penelitian ini diharapkan selain mengembangkan penelitian Samingun (2012) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak, juga untuk membagi kelompok sampel berdasarkan nilai median besaran sanksi pajak SKPKB guna memisahkan perusahaan yang agresif melakukan aktivitas *tax shelter* (*aggressive tax shelter firms*) dari yang *non-aggressive tax shelter firms*. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh bukti empiris mengenai sifat penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil, apakah bersifat substitusi atau komplementer dalam menjelaskan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Pengujian ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Samingun (2012) yang mengindikasikan hanya manajemen laba riil saja yang signifikan mempengaruhi manajemen laba, tetapi manajemen laba akrual tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lanjutan untuk memastikan bahwa kemungkinan besar perusahaan hanya menggunakan manajemen laba riil dalam aktivitas *tax shelter*-nya yang kemungkinan tidak dapat disubstitusikan oleh manajemen laba akrual atau justru keduanya malah saling melengkapi (komplementer). Sebagian besar sampel pada penelitian ini sama dengan sampel penelitian Samingun (2012) karena sama-sama menggunakan SKPKB. Perbedaannya, penelitian ini tidak memasukkan jumlah nilai restitusi bersih dalam perhitungan sanksi pajak. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi faktor SKPLB pada penelitian Samingun (2012) agar penelitian ini fokus pada sanksi pajak yang timbul akibat SKPKB sebagai proksi untuk mengukur *tax shelter*. Selain itu, pengamatan diperpanjang dua tahun menjadi periode 2001-2010.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

***Tax Shelter* dalam Perspektif Teori Keagenan**

Hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham yang masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan ingin memaksimalkan nilai utilitas dari kepentingannya tersebut. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan biaya keagenan yang cukup mahal agar dapat mengurangi *moral hazard* dan asimetri informasi, sehingga manajer dapat sedekat mungkin melakukan aktivitas yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling 1976).

Aktivitas penghindaran pajak pada satu sisi dapat menguntungkan pemegang saham apabila aktivitas tersebut hanya bersifat *tax favored* (Desai dan Dharmapala 2011). Pada sisi lain, manajemen pajak akan merugikan pemegang saham apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif (*tax shelter*) karena perusahaan akan menanggung kerugian di masa depan berupa sanksi pajak yang seharusnya dapat dihindari perusahaan (Hanlon dan Joel 2009).

Tax shelter merupakan salah satu kontinum dalam penelitian penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jika secara umum, penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya mengurangi pajak secara eksplisit, maka *tax shelter* diidentikkan dengan upaya pengurangan pajak secara agresif yang dapat diidentifikasi apabila perusahaan tertangkap dan dituntut secara formal atau terungkap melakukan transaksi tertentu yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku (Hanlon dan Heitzman 2010). Pada penelitian ini, *tax shelter* dipandang sebagai upaya penghindaran pajak untuk mengurangi pajak secara agresif dan tidak bertanggung jawab (Huseynov dan Bonnie 2012). *Tax shelter* diidentifikasi berdasarkan perolehan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setelah dilaksanakannya pemeriksaan oleh

regulator pajak dan diberikan ketetapan hukum final setelah melewati proses keberatan dan banding.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sanksi pajak timbul setelah fiskus melakukan pemeriksaan pajak atas laporan pajak wajib pajak. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan, fiskus atas nama Direktorat Jendral Perpajakan setempat akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak diantaranya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Perusahaan dapat melakukan proses keberatan dan banding apabila tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak yang diperolehnya. SKP tersebut berisi jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan beserta sanksinya (Samingun 2012). Begitu pula dengan proses keberatan dan banding akan menimbulkan sanksi pajak dan biaya lain yang akan ditanggung perusahaan yang akan merugikan pemegang saham, terutama untuk kasus SKPKB. Oleh karena itu, pemegang saham sebaiknya memerhatikan manajemen pajak perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham.

Hubungan Manajemen Laba dan *Tax Shelter*

Wilson (2009) menemukan adanya pengaruh positif signifikan *book tax differences* terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Perbedaan laba akuntansi dan pajak yang semakin tinggi merupakan sinyal pelaporan pajak yang agresif. Investor akan menginterpretasikan *book tax differences* (BTD) yang semakin besar dan positif sebagai “*red flag*” atas kualitas laba yang rendah karena akan mengurangi persistensi laba di masa depan (Hanlon 2005).

Kualitas laba yang rendah dapat disebabkan oleh kualitas akrual dalam pelaporan keuangan perusahaan. Semakin agresif penggunaan akrual, semakin rendah kualitas laba perusahaan. Wilson (2009) dan Frank et al. (2009) berhasil membuktikan bahwa pelaporan keuangan yang agresif berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan pelaporan pajak yang agresif. Penelitian Frank et al. (2009) mendefinisikan pelaporan keuangan

yang agresif sebagai upaya manajemen laba yang meningkatkan laba (*upward earnings management*), sedangkan pelaporan pajak yang agresif didefinisikan sebagai upaya untuk memanipulasi pajak terutang melalui perencanaan pajak yang dapat mengandung unsur penggelapan pajak. Dalam unsur manajemen laba yang agresif terkandung unsur akrual diskresioner yang sarat dengan ketidakpastian yang akan berdampak pada semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Hal ini disebabkan perusahaan dapat memilih metode dan estimasi akuntansi yang dapat menyebabkan perbedaan temporer atau melakukan transaksi yang bukan pengurang atau subyek pajak penghasilan (perbedaan permanen) secara agresif sehingga perusahaan dapat melaporkan laba yang tinggi dan pajak minimum secara bersamaan pada periode berjalan. Kondisi ini berlaku apabila tingkat *book-tax conformity* lingkungan rendah, sehingga memungkinkan perusahaan memiliki diskresi untuk secara leluasa mengatur pelaporan pajak dan labanya. Oleh karena itu, semakin agresif pelaporan akuntansi perusahaan, semakin agresif pelaporan pajaknya. Keputusan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas *tax shelter* merupakan sinyal pada lingkungan perusahaan untuk mendukung tujuan tersebut, salah satunya dengan melakukan pelaporan akuntansi yang agresif juga (Wilson 2009).

Dengan menggunakan sanksi pajak untuk mengukur manajemen laba untuk tujuan pajak, hasil penelitian Samingun (2012) menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi yang agresif lewat akrual tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sanksi pajak, namun berpengaruh signifikan dengan pelaporan akuntansi yang agresif lewat aktivitas riil. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih metode manajemen laba riil dibandingkan akrual untuk keperluan manajemen laba pajak.

Namun manajemen laba untuk tujuan pajak pada penelitian Samingun (2012) bersifat umum, belum menguji manajemen laba untuk tujuan pajak yang bersifat *tax shelter*. Hal ini dikarenakan jumlah sanksi pajak pada

penelitian Samingun (2012) memasukkan nilai restitusi bersih SKPLB, sehingga memungkinkan di dalamnya terdapat unsur penghindaran pajak yang tidak bertujuan untuk menggunakan transaksi tertentu yang bertentangan dengan hukum. Nilai sanksi pajak pada penelitian ini tidak memperhitungkan nilai restitusi bersih SKPLB sebagaimana yang dilakukan Samingun (2012). Hal ini mengacu pada penelitian Graham dan Tucker (2006) dan Lisowsky (2010) yang menggunakan sampel perusahaan yang dinyatakan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* oleh pemerintah atas penggunaan transaksi yang tidak diperkenankan, menerima keterangan kurang bayar pajak (*notice of deficiency*) atas aktivitas *tax sheltering*, atau keduanya. Transaksi yang tidak diperkenankan IRS tersebut diantaranya *lease-in, lease-out (LILLO)*, *transfer pricing (TP)*, *corporate-owned life insurance (COLI)*, *cross-border dividend capture strategy (CBDC)*, *contingent-payment installment sales (CPIS)*, *liquidation and recontribution (LR)*, *offshore intellectual property havens (OIPH)*, atau *contested liability acceleration strategy (CLAS)*. Penelitian ini tidak menggunakan jenis-jenis transaksi di atas untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan *tax shelter* karena data tersebut di Indonesia bersifat rahasia.

Pada umumnya, pelaporan akuntansi yang agresif berhubungan positif dengan *tax shelter*. Semakin tinggi diskresi manajer terhadap akrual, maka semakin agresif pelaporan keuangan perusahaan dan semakin agresif pelaporan pajaknya. Berdasarkan argumentasi di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax sheltering*.

Selain aktivitas akrual, perusahaan dapat menggunakan metode manajemen laba riil dalam pelaporan pajaknya (Samingun 2012). Perusahaan dapat menggunakan diskresi arus kas, biaya produksi, serta beban penjualan dan administrasi dalam aktivitas manajemen laba riil. Perusahaan kemungkinan

menggunakan diskresi arus kas dengan melakukan manipulasi penjualan. Manipulasi penjualan dilakukan dengan cara menawarkan diskon dan memperlunak masa penjualan kredit. Manipulasi penjualan ini berdampak pada kenaikan penjualan pada periode berjalan, namun dapat menurunkan marjin laba kotor akibat diskon yang diberikan serta menurunkan arus kas operasi akibat penjualan kredit. Diskresi biaya produksi dengan cara meningkatkan produksi dapat menurunkan harga pokok penjualan, meningkatkan laba, namun menurunkan arus kas operasi berjalan. Adapun diskresi beban operasi (beban administrasi dan penjualan) dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang menjadi beban periode berjalan sehingga dapat meningkatkan laba dan arus kas operasi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga jenis manajemen laba riil perusahaan, diskresi arus kas dan biaya produksi abnormal memiliki dampak yang serupa, yaitu meningkatkan laba berjalan, tetapi menurunkan arus kas operasi perusahaan sedangkan diskresi beban abnormal dapat meningkatkan laba sekaligus arus kas perusahaan. Akan tetapi, ketiganya berdampak sama terhadap pelaporan laba akuntansi, yaitu sama-sama berupaya menaikkan laba atau cenderung melaporkan laba yang agresif. Pelaporan laba yang agresif mendorong perbedaan laba akuntansi dan laba pajak perusahaan yang semakin besar, sehingga meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *tax shelter*.

Perbedaan laba akuntansi dan pajak terbukti berhubungan positif dengan manajemen pajak dan manajemen laba. Semakin besar perbedaan laba akuntansi dan pajak mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen pajak dan manajemen laba yang lebih agresif (Tang dan Firth 2011; Frank et al. 2009). Berangkat dari argumentasi bahwa perbedaan laba akuntansi dan pajak dapat menangkap kecenderungan manajemen laba akrual, maka hal yang serupa diduga berlaku untuk manajemen laba riil. Semakin agresif manajemen laba riil perusahaan, semakin besar perbedaan laba akuntansi dan pajak sehingga semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter*.

Hasil penelitian Samingun (2012) yang menunjukkan diskresi arus kas abnormal berpengaruh negatif signifikan, sedangkan diskresi beban abnormal berpengaruh positif signifikan terhadap sanksi pajak. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena level sanksi pajak belum membedakan tingkat agresivitas *tax shelter* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{2a}: Manajemen laba riil melalui arus kas operasi berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax sheltering*.

H_{2b}: Manajemen laba riil melalui biaya produksi berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax sheltering*.

H_{2c}: Manajemen laba riil melalui beban diskresioner berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax sheltering*.

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan publikasi yang diperoleh dari Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini mengikuti penelitian Samingun (2012) dengan mengubah identifikasi perusahaan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010. Sampel final yang diperoleh berdasarkan metode *purposive sampling* adalah 108 pengamatan (*firm years*) setelah mengeluarkan *outliers*. Berikut prosedur pemilihan sampel:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan terindikasi memperoleh sanksi pajak, sebagaimana yang dilakukan Samingun (2012). Periode pengamatan adalah periode perusahaan menerima

ketetapan final regulator mengenai kurang bayar pajak penghasilan baik menerima tanpa keberatan, setelah keberatan, ataupun setelah proses banding. Periode pengamatan diperpanjang dari periode penelitian Samingun (2012) menjadi tahun 2001-2010.

2. Apabila perusahaan menerima SKPKB dan mengajukan keberatan dan kemudian banding, selama belum ada ketetapan pajak dari regulator mengenai permohonannya, walaupun perusahaan sudah membayar sebagian atau seluruh sanksi pajak SKPKB, maka perusahaan tersebut dikeluarkan dalam sampel.
3. Apabila regulator pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding perusahaan, maka jumlah sanksi pajak yang diakui pada penelitian ini adalah pajak terutang ditambah denda yang dikabulkan regulator baik sebagian atau seluruhnya.
4. Perusahaan menyampaikan laporan keuangan lengkap beserta pengungkapan mengenai SKPKB, status hukum, dan jumlah sanksi (pokok ditambah denda kurang bayar) yang menjadi ketetapan pajak regulator.

Model Penelitian

Berikut model penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian sekaligus menguji hipotesis 1 dan 2a-2c. Model penelitian 1 diadaptasi dari model Samingun (2012) dengan penyesuaian pada variabel terikatnya dan penambahan dua variabel kontrol yaitu *leverage* dan ROA. Variabel terikat pada model Samingun (2012) adalah manajemen laba untuk tujuan pajak perusahaan (EMT) yang diukur dengan nilai sanksi pajak bersih setelah memperhitungkan kompensasi lebih bayar dan denda pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* (TS) yang diukur dengan nilai sanksi pajak kurang bayar beserta dendanya. Metode regresi logistik digunakan karena variabel terikat merupakan variabel kategorikal, yakni perusahaan yang

terindikasi agresif melakukan *tax shelter* dan yang tidak agresif. Pengelompokan sampel dilakukan untuk memisahkan perusahaan yang secara intensif berupaya keras melakukan *tax sheltering* dan yang kurang intensif. Level sanksi pajak dipandang kurang memadai untuk menilai besaran penggelapan pajak akibat aktivitas *tax shelter*. Sanksi pajak hanyalah merupakan proksi perusahaan terindikasi melakukan aktivitas *tax shelter*. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode yang sama, hanya berbeda dalam proksi ukuran dalam mengidentifikasi aktivitas *tax shelter* seperti dilakukan Lisowsky (2010).

$$\frac{TS_i}{1-TS_i} = \beta_0 + \beta_1 AbsDA_i + \beta_2 AbsbnCFO_i + \beta_3 AbsAbPROD_i + \beta_4 AbsAbnDISEXP_i + \beta_5 LEV_i + \beta_6 ROA_i + \beta_7 SIZE_i + \varepsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- TS : Perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas *tax shelter* yang diukur dengan nilai sanksi pajak kurang bayar plus denda pada tahun t. Apabila nilai sanksi pajak perusahaan i di atas nilai mediannya, maka dikategorikan sebagai perusahaan yang terindikasi melakukan *aggressive tax shelter* dan diberi nilai 1, jika tidak dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak terindikasi melakukan *non-aggressive tax shelter* dan diberi nilai 0.
- DA : Manajemen laba akrual yang diukur dengan akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t.
- AbnCFO_i : Manajemen laba riil yang diukur dengan arus kas operasi abnormal diskresioner perusahaan i pada tahun t.
- AbnPROD_i : Manajemen laba riil yang diukur dengan biaya produksi abnormal diskresioner perusahaan i pada tahun t

Abn DISEXP _i	: Manajemen laba riil yang diukur dengan beban abnormal diskresioner perusahaan i pada tahun t.
LEV _i	: <i>Leverage</i> perusahaan i yang diukur dengan rasio utang jangka panjang dibagi dengan total aset pada tahun t.
ROA _i	: Profitabilitas perusahaan i yang diukur dengan rasio laba sebelum pajak dibagi total aset.
LnSIZE _i	: Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan i pada tahun t
ε	: Error

Hipotesis 1, 2a, 2b, dan 2c tidak dapat ditolak apabila masing-masing koefisien $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 > 0$, dan $\beta_4 > 0$. Adapun ketiga variabel kontrol diekspektasikan sebagai berikut: $\beta_5 < 0$, $\beta_6 > 0$, $\beta_7 \neq 0$.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemungkinan perusahaan wajib pajak melakukan aktivitas *aggressive tax shelter* (TS) atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif. Untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter* digunakan informasi resmi dari regulator perpajakan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk pajak penghasilan. SKPKB yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diantaranya memuat jumlah pajak terutang beserta denda (jika ada) yang pada penelitian ini disebut sebagai sanksi pajak. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tidak dimasukkan pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik perusahaan yang sejak awal memiliki intensi melakukan penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan akibat sanksi yang harus dibayarkannya.

Untuk menghindari bias sampel dalam aktivitas *tax shelter* sebagaimana yang di-

sampaikan (Hanlon dan Heitzman 2010), maka sampel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak secara agresif (*aggressive tax shelter firms*) dan perusahaan yang tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak secara agresif (*non-aggressive tax shelter firms*). Sampel dikategorikan sebagai *aggressive tax shelter firms* jika nilai sanksi pajaknya di atas nilai median sanksi pajak, sedangkan dikategorikan sebagai *non-aggressive tax shelter firms* jika nilai sanksi pajaknya di bawah nilai mediannya. Variabel TS kemudian akan diukur dengan variabel *dummy*, diberi nilai 1 untuk *aggressive tax shelter firms* dan 0 untuk *non-aggressive tax shelter firms*.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah manajemen laba akrual yang diprosikan dengan akrual diskresioner (DA) dan manajemen laba riil yang diprosikan dengan arus kas abnormal diskresioner (AbnCFO), biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD), dan beban diskresioner abnormal diskresioner (AbnDISEXP).

Sebagaimana dalam Samingun (2012), manajemen laba akrual menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow, Sloan, dan Sweeney 1995), sedangkan manajemen laba riil menggunakan model Roychowdhury (2006). Variabel akrual diskresioner (DA) diperoleh dari nilai residual hasil estimasi *Modified Jones Model* sebagaimana disampaikan pada persamaan 2 dan 3a-3c.

$$TACC_{it} = \alpha + \beta_1 (\Delta Sales_{it} - \Delta AR_{it}) + \beta_2 PPE_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- | | |
|---------------------|--|
| TACC _{it} | : Total akrual perusahaan i pada tahun t, yaitu selisih antara laba sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan dengan arus kas operasi |
| $\Delta Sales_{it}$ | : Perubahan pendapatan perusahaan i tahun t dengan t-1 |
| ΔAR_{it} | : Perubahan piutang dagang perusahaan i tahun t dengan t-1 |

- PPE_{it} : Nilai buku aset tetap kotor perusahaan *i* tahun *t*
- ε_{it} : Residual (akrual diskresioner, disingkat DA)

Semua variabel di atas diskalakan dengan total aset tahun *t-1* dan model akrual diestimasi secara lintas pengamatan (*cross sectional*) dengan menggunakan populasi 116 perusahaan.

Abnormal CFO diperoleh dengan terlebih dahulu mengestimasi model sebagai berikut:

$$CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \beta_1 (S_t/A_{t-1}) + \beta_2 (\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3a)$$

CFO_t adalah arus kas operasi pada periode *t*, adalah total aset pada periode *t-1*, adalah penjualan pada periode *t*, adalah selisih penjualan pada periode *t* dan *t-1*. Koefisien hasil estimasi digunakan untuk menghitung CFO normal. Selisih antara CFO aktual dengan CFO normal merupakan *abnormal CFO*. Model *abnormal CFO* diestimasi secara lintas pengamatan (*cross sectional*) dengan menggunakan populasi 116 perusahaan. Perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba ril melalui *abnormal CFO* apabila nilai *abnormal CFO* lebih kecil dari normal CFO atau dengan kata lain *abnormal CFO* bernilai negatif. Semakin negatif, semakin besar manajemen laba ril yang dilakukan perusahaan akibat pemberian diskon besar-besaran atau memberikan fasilitas kredit yang lebih lunak. Biaya produksi abnormal (*AbnPROD*) diperoleh dengan terlebih dahulu mengestimasi model sebagai berikut:

$$PROD_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \beta_1 (S_t/A_{t-1}) + \beta_2 (\Delta S_t/A_{t-1}) + \beta_3 (\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3b)$$

PROD_t adalah biaya produksi pada periode *t*, adalah total aset pada periode *t-1*, S_t adalah penjualan pada periode *t*, ΔS_t adalah selisih penjualan pada periode *t* dan *t-1*, dan ΔS_{t-1} adalah selisih penjualan pada periode *t-1* dan *t-2*. Koefisien hasil estimasi digunakan

untuk menghitung normal PROD. Selisih antara PROD aktual dengan PROD normal merupakan *abnormal PROD* (*AbnProd*). Model *abnormal PROD* diestimasi secara lintas pengamatan (*cross sectional*) dengan menggunakan populasi 116 perusahaan. Perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba riil melalui *abnormal PROD* apabila nilai *abnormal PROD* lebih besar dari PROD normal atau dengan kata lain *abnormal PROD* bernilai positif. Semakin positif, semakin besar manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan akibat melakukan produksi berlebihan.

Beban diskresioner abnormal (*Abn DISEXP*) diperoleh dengan terlebih dahulu mengestimasi model sebagai berikut:

$$DISEXP_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \beta_1 (S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3c)$$

DISEXP adalah beban diskresioner pada periode *t*, adalah total aset pada periode *t-1*, adalah penjualan pada periode *t-1*. Koefisien hasil estimasi digunakan untuk menghitung DISEXP normal. Selisih antara DISEXP aktual dengan DISEXP normal merupakan *abnormal DISEXP* (*AbnDISEXP*). Beban diskresioner terdiri atas beban riset dan pengembangan, beban penjualan, serta beban administrasi dan umum. Model *abnormal DISEXP* diestimasi secara lintas pengamatan (*cross sectional*) dengan menggunakan populasi 116 perusahaan. Perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba riil melalui *abnormal DISEXP* apabila nilai *abnormal DISEXP* lebih kecil dari DISEXP normal atau dengan kata lain *abnormal DISEXP* bernilai negatif. Semakin negatif, semakin besar manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan akibat pengurangan beban administrasi dan penjualan yang besar.

Penelitian ini menggunakan tingkat leverage (LEV), profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan (LnSIZE) untuk mengontrol dampak perbedaan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* (Wilson 2009; Lisowsky 2010). *Leverage* diekspektasikan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan

perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter* karena *tax saving* dari kegiatan ini mensubstitusi penggunaan beban bunga utang. *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio utang jangka panjang dibagi total aset. Pembayaran beban bunga mensubstitusi pembayaran pajak, sehingga perusahaan menggunakan manajemen laba akrual yang kurang agresif untuk menurunkan pembayaran pajak.

Profitabilitas diekspektasikan berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Perusahaan yang menguntungkan diduga lebih agresif dalam melakukan *tax shelter*. Perusahaan yang menguntungkan memiliki diskresi yang lebih besar dalam mengatur laba akuntansinya dibandingkan perusahaan merugi, sehingga meningkatkan kemungkinan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio laba sebelum pajak dibagi total aset. Sulit untuk menentukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Variabel ini diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif dan Uji Korelasi antar Variabel

Tabel 1 menunjukkan terdapat 108 pengamatan yang lolos prosedur pemilihan sampel. Empat puluh tujuh persen (51 dari 108 pengamatan) merupakan *aggressive tax shelter firms* yaitu perusahaan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak secara agresif. Terdapat 142 perusahaan yang menerima SKPKB selama 10 periode pengamatan, namun dua puluh enam perusahaan diantaranya masih dalam proses mengajukan keberatan dan banding. Delapan perusahaan dikeluarkan diantaranya karena memiliki nilai *leverage* lebih dari 1 (total liabilitas jangka panjang melebihi nilai total asetnya) dan melebihi 3 standar deviasinya.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Pengamatan yang menerima SKPKB dari tahun 2001-2010	142
Pengamatan yang menerima SKPKB tetapi belum menerima keputusan SKPKB final (mengajukan keberatan atau banding)	(26)
Jumlah pengamatan yang memenuhi kriteria	116
<i>Outlier</i>	(8)
Sampel Akhir	108

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif data setiap variabel penelitian. Berdasarkan nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi, dapat dikatakan sebaran data relatif kecil yang menunjukkan karakteristik data yang cukup mendekati distribusi normal. Nilai rata-rata variabel DA adalah sebesar 0,00149796, yang mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba akrual diskresioner untuk menaikkan laba (*income increasing*). Adapun nilai *mean* variabel AbnCFO, AbnPROD, AbnDISEXP berturut-turut bernilai -0,00407374, -0,01324659, dan -0,00147109 yang mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba riil arus kas operasi dan beban diskresionernya, namun tidak melalui biaya produksi diskresionernya. Hal ini menunjukkan terdapat indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba riil lewat AbnCFO dan AbnDISEXP.

Tabel 3 menunjukkan korelasi antar variabel yang memberikan gambaran indikasi awal hubungan antar variabel penelitian. Variabel DA berkorelasi positif signifikan dengan AbnCFO. Pada penelitian ini, nilai variabel AbnCFO tidak dikalikan dengan angka minus 1 (-1), sehingga korelasi positif menunjukkan semakin besar manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan, semakin kecil diskresi akrual perusahaan. Hasil ini mengindikasikan perusahaan tidak melakukan manipulasi penjualan secara bersamaan dengan manipulasi akrual. Dengan kata lain,

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ProbTS	108	0	1	.51	.502
AbnCFO	108	-0.752803	0.289713	-0.00407374	0.128938296
AbnPROD	108	-0.867982	0.909020	-0.01324659	0.216264178
AbnDISEXP	108	-0.289036	0.780674	-0.00147109	0.153818051
LEV	108	0.000000	0.977213	0.17214612	0.194860428
ROA	108	-0.269945	0.222901	0.01720251	0.103238839
SIZE (JutaanRp)	108	53.557,69	80.739.999,73	736.768,92	10.352.783,55

ProbTS adalah kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter* secara agresif yang diukur dengan variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika nilai sanksi pajak di atas nilai median dan 0 jika sebaliknya.

DA adalah manajemen laba akrual diskresioner yang diproksikan dengan *modified discretionary accrual Jones model*. Manajemen laba ril diproksikan dengan: AbnCFO yaitu arus kas abnormal diskresioner (AbnCFO); biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD), dan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP). LEV adalah *leverage* perusahaan, diukur dengan utang jangka panjang dibagi total aset; ROA adalah profitabilitas perusahaan, diukur dengan laba sebelum pajak dibagi total aset; sedangkan SIZE adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset.

Tabel 3
Korelasi AntarVariabel

	Variabel	ProbTS	DA	AbnCFO	AbnProd	AbnDISEXP	LEV	ROA	SIZE
ProbTS	Pearson Correlation	1	-0.219*	-0.287**	0.151	-0.082	-0.043	0.068	0.372**
	Sig. (2-tailed)		0.023	0.003	0.119	0.400	0.660	0.484	0.000
DA	Pearson Correlation	-0.219*	1	0.633**	0.122	0.009	0.086	-0.093	-0.170
	Sig. (2-tailed)	0.023		0.000	0.210	0.926	0.377	0.339	0.078
AbnCFO	Pearson Correlation	-0.287**	0.633**	1	0.142	0.110	-0.010	0.141	-0.256**
	Sig. (2-tailed)	0.003	0.000		0.143	0.258	0.919	0.145	0.007
AbnProd	Pearson Correlation	0.151	0.122	0.142	1	0.352**	-0.219*	0.232*	-0.131
	Sig. (2-tailed)	0.119	0.210	0.143		0.000	0.023	0.016	0.175
AbnDISEXP	Pearson Correlation	-0.082	0.009	0.110	0.352**	1	-0.280**	0.206*	-0.272**
	Sig. (2-tailed)	0.400	0.926	0.258	0.000		0.003	0.032	0.004
LEV	Pearson Correlation	-0.043	0.086	-0.010	-0.219*	-0.280**	1	-0.092	0.225*
	Sig. (2-tailed)	0.660	0.377	0.919	0.023	0.003		0.342	0.019
ROA	Pearson Correlation	0.068	-0.093	0.141	0.232*	0.206*	-0.092	1	0.070
	Sig. (2-tailed)	0.484	0.339	0.145	0.016	0.032	0.342		0.473
SIZE	Pearson Correlation	0.372**	0-0.170	-0.256**	-0.131	-0.272**	0.225*	0.070	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.078	0.007	0.175	0.004	0.019	0.473	
	N	108	108	108	108	108	108	108	108

ProbTS adalah kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter* secara agresif yang diukur dengan variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika nilai sanksi pajak di atas nilai median dan 0 jika sebaliknya. DA adalah manajemen laba akrual diskresioner yang diproksikan dengan *modified discretionary accrual Jones model*. Manajemen laba ril diproksikan dengan: AbnCFO yaitu arus kas abnormal diskresioner (AbnCFO); biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD), dan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP). LEV adalah *leverage* perusahaan, diukur dengan utang jangka panjang dibagi total aset; ROA adalah profitabilitas perusahaan, diukur dengan laba sebelum pajak dibagi total aset; sedangkan SIZE adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset.

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

terdapat indikasi penggunaan kedua teknik manajemen laba ini bersifat substitusi. Selain itu, kedua variabel tersebut berkorelasi negatif signifikan dengan kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *aggressive tax shelter*. Temuan ini mengindikasikan manajemen laba akrual menurunkan kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *aggressive tax shelter*; namun sebaliknya dengan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal. Adapun kedua variabel manajemen laba riil lainnya (AbnProd dan AbnDISEXP) tidak berkorelasi signifikan dengan kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *aggressive tax shelter*. Dari ketiga variabel kontrol, hanya variabel LnSIZE yang berkorelasi positif signifikan dengan kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *aggressive tax shelter*. Hal ini mengindikasikan perusahaan besar lebih cenderung melakukan *aggressive tax shelter* dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

HASIL UJI HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Manajemen Laba Akrual dan Kemungkinan Perusahaan Melakukan *Aggressive Tax Shelter*

Model penelitian diestimasi dengan menggunakan regresi logistik. Hasil uji normalitas menunjukkan model ini terbebas dari masalah asumsi normalitas. Analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)* bernilai 0,729 dan tidak signifikan. Dari hasil uji kecocokan model dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, diperoleh nilai signifikansi *Chi-Square* di atas 5%, dengan kata lain model telah cocok dengan data. Uji validitas model dilihat dari nilai *Cox dan Snell R.Square* dan nilai *Nagelkerke R. Square*. Berdasarkan hasil estimasi, nilai *Cox dan Snell R.Square* dan nilai *Nagelkerke R. Square* masing-masing sebesar 32,7% dan 43,7% sehingga disimpulkan variabilitas variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 43,7%.

Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi model penelitian dengan menggunakan regresi logistik (LOGIT). Hasil estimasi

model penelitian diperoleh koefisien β_1 yang merupakan koefisien regresi akrual diskresioner (DA) bernilai negatif signifikan (berlawanan dengan prediksi). Oleh karena itu, hasil penelitian tidak mendukung hipotesis penelitian 1 (H_1) yang menyatakan bahwa diskresi manajemen laba akrual meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Samingun (2012) yang nilai koefisien akrual diskresionernya (DA) bernilai positif tidak signifikan dan penelitian terdahulu yang menunjukkan terdapat hubungan yang positif signifikan antara agresivitas pelaporan akuntansi (akrual) dengan pelaporan pajak yang agresif atau *tax shelter* (Wilson 2009; Lisowsky 2010). Perbedaan di atas kemungkinan terjadi karena pada penelitian Samingun (2012) belum mengontrol tingkat *leverage* dan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Adapun model penelitian yang digunakan penelitian Wilson (2009) dan Lisowsky (2010) belum memasukkan aktivitas manajemen laba riil yang mungkin mempengaruhi keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter*. Karakteristik diskresi akrual (DA) pada penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut, yaitu rerata akrual diskresioner bersifat *upward earnings management* dan bernilai sekitar 0,01.

Hasil penelitian ini justru menunjukkan penggunaan akrual menurunkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Dengan kata lain, terdapat *trade-off* dalam perencanaan pajak antara meminimumkan pembayaran pajak dengan melaporkan laba yang rendah. Perusahaan cenderung memilih metode dan estimasi akuntansi yang meminimumkan laba untuk meminimumkan pelaporan pajak terutang. Kondisi ini umumnya didorong oleh tekanan kontraktual dengan pihak ketiga seperti regulator, kreditor, pemasok, dan lain lain (Shackelford dan Shevlin 2001). Pada penelitian ini, tekanan kontraktual yang paling memungkinkan

adalah tekanan kontraktual dengan kreditor. Pembayaran beban bunga mensubstitusi pembayaran pajak, sehingga perusahaan menggunakan manajemen laba akrual yang kurang agresif untuk menurunkan pembayaran pajak. Argumentasi ini didukung oleh variabel *leverage* berpengaruh negatif signifikan (sesuai prediksi) terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktifitas *aggressive tax shelter*. Selain itu, hubungan yang positif antara pelaporan laba yang agresif (khususnya akrual diskresioner) dengan pajak agresif dimungkinkan terjadi pada lingkungan dengan tingkat *book-tax conformity* yang relatif rendah. Pada lingkungan tersebut, perusahaan dapat lebih leluasa dalam mengelola laba akuntansi dan laba pajak akibat kesenjangan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan relatif besar. Kondisi ini memperbesar perbedaan laba akuntansi dan pajak baik yang bersifat temporer maupun permanen, sehingga meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktifitas *aggressive tax shelter* (Frank et al. 2009).

Manajemen Laba Riil dan Kemungkinan Perusahaan Melakukan *Aggressive Tax Shelter*

Dari hasil estimasi model penelitian diperoleh koefisien β_2 yang merupakan koefisien regresi arus kas operasi abnormal diskresioner (AbnCFO) bernilai negatif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai arus kas operasi diskresioner abnormal, semakin tinggi manajemen laba riil melalui arus kas operasi diskresioner, sehingga menaikkan kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax sheltering*. Dengan demikian hipotesis penelitian H_{2a} yang menyatakan bahwa diskresi arus kas operasi abnormal berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* tidak dapat ditolak. Koefisien β_3 yang merupakan koefisien regresi biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD) bernilai positif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai biaya produksi abnormal, semakin tinggi manajemen laba riil melalui arus kas operasi diskresioner sehingga menaikkan

Tabel 4
Hasil Estimasi Model Penelitian

Variabel	Ekspektasi Tanda	B	S.E.	Wald	Sig.	Exp (B)
AbsDA	+	-7.096	4.036	3.091	0.079*	0.001
AbsAbnCFO	-	-13.875	4.784	8.411	0.004***	0.000
AbsAbnProd	+	7.347	2.533	8.414	0.004***	1552.295
AbsAbnDISEXP	-	-2.784	4.099	.461	0.497	0.062
LEV	+	-2.174	1.289	2.845	0.092*	0.114
ROA	+	1.563	2.656	.346	0.556	4.772
SIZE	?	1.121	.314	12.734	0.000***	3.068
Constant		-13.819	4.173	10.964	0.001	0.000

Hosmer and Lemeshow's Test

<i>Chi-Square</i>	3.665	Nilai Cox dan Snell R.Square	32.7%
<i>Sig</i>	0.866	Nilai Nagelkerke R. Square	43.7%

Variabel terikat adalah kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter* secara agresif (TS) yang diukur dengan variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika nilai sanksi pajak di atas nilai median dan 0 jika sebaliknya. Variabel bebas terdiri atas manajemen laba akrual yang diprosikan dengan akrual diskresioner (DA) dan manajemen laba ril yang diprosikan dengan arus kas operasi abnormal diskresioner (AbnCFO), biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD), dan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP). Variabel kontrol terdiri atas LEV, ROA, dan LnSIZE. LEV adalah *leverage* perusahaan, diukur dengan utang jangka panjang dibagi total aset; ROA adalah profitabilitas perusahaan, diukur dengan laba sebelum pajak dibagi total aset, sedangkan LnSIZE adalah variabel kontrol yang diukur dengan logaritma natural total aset.

*) signifikan pada level 10%; **) signifikan pada level 5%; ***) signifikan pada level 1%, pengujian satu sisi kecuali untuk LnSIZE

kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter*. Dengan demikian hipotesis penelitian H_{2a} yang menyatakan bahwa diskresi arus kas operasi abnormal berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* tidak dapat ditolak. Adapun koefisien β_4 yang merupakan koefisien regresi beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP) bernilai positif tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis penelitian H_{2c} yang menyatakan bahwa diskresi beban abnormal berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga teknik manajemen riil, teknik arus kas operasi abnormal dan biaya produksi abnormal yang digunakan perusahaan dalam aktivitas *aggressive tax shelter*, sedangkan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP) tidak berpengaruh. Koefisien regresi arus kas operasi abnormal diskresioner (AbnCFO) bernilai negatif signifikan menunjukkan bahwa manipulasi penjualan yang berdampak pada penurunan arus kas operasi berjalan perusahaan meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Samingun (2012) yang melaporkan laba akuntansi yang agresif untuk melaporkan laba pajak yang agresif melalui manipulasi penjualan untuk mengimbangi manajemen laba akrual yang justru menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas *tax shelter*. Perusahaan memilih mempercepat penjualan yang menaikkan perbedaan laba akuntansi dan pajak, sehingga meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter*.

Koefisien regresi biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD) bernilai positif signifikan menunjukkan perusahaan melakukan produksi berlebih dengan tujuan melaporkan laba akuntansi dan laporan laba pajak yang agresif secara bersamaan. Produksi yang berlebih dapat menurunkan harga pokok penjualan perusahaan per unit, meningkatkan margin penjualan dan laba akuntansi, namun menurunkan arus kas operasi perusahaan. Kondisi ini menyebabkan perbedaan laba

akuntansi dan pajak menjadi lebih besar, sehingga meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter*. Temuan ini bertolak belakang dengan kemampuan akrual yang menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* dan sejalan dengan kemampuan arus kas diskresioner abnormal. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perusahaan menggunakan ketiga teknik manajemen laba ini untuk tujuan yang berbeda dalam kegiatan perencanaan pajaknya.

Berdasarkan paparan di atas, dari ketiga jenis manajemen laba riil, hanya beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *aggressive tax shelter*. Kemungkinan penjelasan dari temuan ini dapat disebabkan jenis manajemen laba ini tidak terlalu memiliki diskresi yang besar untuk mengaturnya dibandingkan dengan kedua teknik manajemen laba lainnya. Komponen beban diskresioner abnormal terdiri atas biaya riset dan pengembangan, beban penjualan, serta beban administrasi dan umum. Pada penelitian ini, perusahaan kemungkinan hanya melakukan diskresi beban penjualan serta beban administrasi dan umum, mengingat tidak satupun dari sampel pada penelitian ini memiliki biaya riset dan pengembangan. Hal ini terlihat pada nilai rata-rata beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP) yang memiliki nilai yang paling kecil dibandingkan diskresi arus kas dan biaya produksi abnormal perusahaan. Selain itu, komponen beban tersebut umumnya tidak langsung dapat menghasilkan pendapatan, sehingga manipulasi jenis beban ini menghasilkan arus kas masa depan yang lebih rendah dibandingkan dengan kedua teknik manajemen laba riil lainnya. Jika manipulasi penjualan dengan memberikan fasilitas kredit lunak dapat meningkatkan arus kas periode berikutnya, begitu pula dengan produksi berlebih yang dapat menurunkan harga pokok penjualan per unit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Adapun manajemen laba riil lewat beban abnormal diskresioner dilakukan hanya dengan mengurangi beban yang diakui pada periode berjalan, sehingga

tidak berdampak langsung terhadap penjualan perusahaan dan arus kas periode yang akan datang.

Variabel kontrol yang signifikan mempengaruhi kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* adalah variabel *leverage* (LEV) dan ukuran perusahaan (SIZE), sedangkan ROA tidak. Sejalan dengan penelitian terdahulu, LEV terbukti berpengaruh negatif (sesuai prediksi) signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* (Graham dan Tucker 2006; Frank et al. 2009). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki insentif untuk menurunkan agresivitas pelaporan pajaknya dengan melaporkan laba akuntansi yang kurang agresif akibat sudah menanggung beban bunga pada periode berjalan.

Begitu pula dengan SIZE yang berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter* dan sejalan dengan penelitian Frank et al. (2009) dan Samingun (2012). Dengan demikian, semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter*. Hasil penelitian ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat dibutuhkan biaya yang besar jika perusahaan terlibat pada aktivitas *aggressive tax shelter*. Sehingga perusahaan besar relatif memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan yang lebih besar cenderung menjadi perhatian publik dan regulator sehingga harus berupaya lebih keras jika terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter* agar keterlibatannya tersebut tidak merugikan pemegang saham secara umum.

PENGUJIAN TAMBAHAN

Hasil pengujian model utama menunjukkan kemungkinan perusahaan menggunakan baik manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Terdapat dua temuan yang bertolak belakang diantara teknik manajemen laba tersebut. Diskresi arus kas operasi abnormal dan diskresi biaya produksi abnormal justru meningkatkan kemungkinan

aktivitas *aggressive tax shelter* perusahaan, sedangkan diskresi akrual terbukti menurunkan kemungkinan aktivitas *aggressive tax shelter* perusahaan. Oleh karena itu, terdapat dugaan perusahaan dapat menggunakan kombinasi manajemen laba sesuai tujuan *tax shelter* perusahaan. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka dilakukan pengujian tambahan dengan menguji kemungkinan penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil dapat saling menggantikan (substitusi) atau saling melengkapi (komplementer).

Pengujian dilakukan dengan cara menguji secara bersama-sama antara keempat teknik manajemen laba (akrual dan AbnCFO, AbnProd, AbnDISEXP) dan mengujinya secara parsial dengan kombinasi: DA dan AbnCFO, DA dan AbnProd, DA dan AbnDISEXP, serta AbnCFO dan AbnProd. Kombinasi kedua teknik manajemen laba dikatakan bersifat komplementer apabila ketika diuji secara bersamaan menunjukkan kedua variabel signifikan dengan arah yang sama memengaruhi *aggressive tax shelter*. Sebaliknya, kombinasi kedua teknik manajemen laba dikatakan bersifat substitusi apabila ketika diuji secara bersamaan menunjukkan salah satu variabel signifikan mempengaruhi *aggressive tax shelter* dan hasil pengujian parsial kedua variabel menunjukkan hasil yang signifikan dengan tanda yang berlawanan.

Kolom 4-7 pada Tabel 5 menunjukkan hasil estimasi model 4 kombinasi teknik manajemen laba, berturut-turut: kombinasi akrual (DA) dengan diskresi arus kas abnormal (AbnCFO), DA dengan diskresi biaya produksi abnormal (AbnProd), DA dengan diskresi beban abnormal (AbnEXP), dan AbnCFO dengan AbnProd. Kolom 4a menunjukkan hanya variabel AbnCFO yang signifikan (negatif), sedangkan DA tidak signifikan. Setelah diuji secara parsial, kedua variabel tersebut negatif signifikan (lihat kolom 4b dan 4c). Walaupun kedua koefisien tersebut sama-sama negatif signifikan, namun interpretasi keduanya berbeda. Kedua variabel relatif konsisten dengan hasil estimasi model utama. Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan penggunaan manajemen laba

akrual dan manajemen laba riil via AbnCFO bersifat substitusi dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Perusahaan kemungkinan dapat memilih salah satu dari keduanya untuk menaikkan (menurunkan) agresivitas *tax shelter*.

Kolom 5d menunjukkan kedua variabel DA dan AbnProd signifikan, namun dengan arah yang berlawanan. Hasilnya konsisten setelah diuji secara parsial bahwa DA bernilai negatif signifikan, sedangkan AbnProd positif signifikan (lihat kolom 4b dan 5e). Kedua variabel relatif konsisten dengan hasil estimasi model utama. Temuan ini menunjukkan bahwa

kemungkinan penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil via AbnProd bersifat substitusi dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Perusahaan kemungkinan dapat menggunakan secara bersamaan kedua variabel tersebut untuk menurunkan atau menaikkan agresivitas *tax shelter*.

Kolom 6f menunjukkan hanya variabel DA yang bernilai signifikan (negatif), sedangkan AbnDisExp tidak signifikan. Hasilnya konsisten setelah diuji secara parsial bahwa DA bernilai negatif signifikan, sedangkan AbnDisExp tidak signifikan (lihat kolom 4b dan 6g). Kedua variabel

Tabel 5
Hasil Pengujian Tambahan

(1) Variabel	(2) Ekspektasi Tanda	(3) Akrual & Ril	(4) DA Vs AbnCFO			(5) DA Vs AbnProd		(6) DA Vs AbnDISEXP		(7) CFO Vs AbnProd
			(a) DA & CFO	(b) DA	(c) CFO	(d) DA & Prod	(e) Prod	(f) DA & DISEXP	(g) DisExp	(h) CFO & Prod
AbsDA	+	-7.096 0.079*	-4.015 0.248	-6.594 0.052*	-9.937 0.012*		-6.763 .055*			
AbsAbnCFO	-	-13.875 0.004***	-9.224 0.027**		-10.810 0.007***					-15.683 0.001***
AbsAbnProd	+	7.347 0.004***			4.938 0.021**	3.074 0.076*				5.665 0.007***
AbsAbnDISEXP	-	-2.784 0.497					0.506 0.844	-0.555 0.835		
LEV	+	-2.174 0.092*	-2.261 0.069*	-2.217 0.072*	-2.027 0.094*	-1.876 0.133	-1.478 0.209	-2.185 0.079*	-1.879 0.113	-1.737 0.160
ROA	+	1.563 0.556	2.557 0.297	0.441 0.840	3.343 0.157	-1.518 0.517	0.135 0.952	0.319 0.888	1.372 0.535	2.462 0.318
SIZE	-	1.121 0.000***	0.902 0.001***	0.922 0.000***	0.885 0.001***	1.006 0.000***	0.925 0.000***	0.935 0.000***	0.876 0.000***	1.090 0.000***
Constant		-13.819 0.001	-10.676 0.002	-11.409 0.001	-10.721 0.002	-13.029 0.000	-12.607 0.000	-11.630 0.001	-11.369 0.001	-13.981 0.001
Nagelkerke R Square		0.437	0.330	0.279	0.317	0.349	0.266	0.280	0.229	0.399
				Substitusi		Substitusi		Non-Substitusi dan Non-Komplementer		Kom- plementer

Variabel terikat adalah kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter* secara agresif (TS) yang diukur dengan variabel dummy, diberi nilai 1 jika nilai sanksi pajak di atas nilai median dan 0 jika sebaliknya. Variabel bebas terdiri atas manajemen laba akrual yang diprosikan dengan akrual diskresioner (DA) dan manajemen laba riil yang diprosikan dengan arus kas operasi abnormal diskresioner (AbnCFO), biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD), dan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP). Variabel kontrol terdiri atas LEV, ROA, dan LnSIZE. LEV adalah *leverage* perusahaan, diukur dengan utang jangka panjang dibagi total aset; ROA adalah profitabilitas perusahaan, diukur dengan laba sebelum pajak dibagi total aset, sedangkan LnSIZE adalah variabel kontrol yang diukur dengan logaritma natural total aset.

*) signifikan pada level 10%; **) signifikan pada level 5%; ***) signifikan pada level 1%, pengujian satu sisi kecuali untuk LnSIZE

relatif konsisten dengan hasil estimasi model utama. Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil via AbnDisEXP tidak bersifat substitusi maupun komplementer dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Perusahaan kemungkinan hanya dapat menggunakan manajemen laba akrual, tetapi tidak dapat menggunakan manajemen laba riil via AbnDisEXP dalam aktivitas *aggressive tax shelter*.

Kolom 7h menunjukkan kedua variabel AbnCFO dan AbnProd signifikan. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemungkinan penggunaan kedua teknik ini dalam aktivitas *tax shelter*, mengingat pada model utama hanya kedua variabel ini yang signifikan meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Hasilnya konsisten setelah diuji secara parsial bahwa AbnCFO bernilai negatif signifikan, sedangkan AbnProd positif signifikan (lihat kolom 4b dan 5e). Kedua variabel relatif konsisten dengan hasil estimasi model utama. Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan penggunaan manajemen laba riil via AbnCFO dan manajemen laba riil via AbnProd bersifat komplementer dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Perusahaan kemungkinan dapat menggunakan secara bersamaan kedua variabel tersebut untuk menaikkan agresivitas *tax shelter*.

Dengan demikian, pengujian tambahan ini memperkaya temuan pada pengujian awal (model utama) bahwa perusahaan kemungkinan menggunakan manajemen laba akrual dan manajemen laba ril via diskresi arus kas abnormal dan diskresi biaya produksi abnormal dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Perusahaan kemungkinan tidak menggunakan manajemen laba ril lewat beban diskresioner abnormal dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Bukti empiris ini sekaligus menindaklanjuti penelitian Samingun (2012) yang belum melakukan pengujian mengenai sifat penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil dalam aktivitas *aggressive tax shelter*.

SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan pengaruh hubungan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *aggressive tax shelter*. Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang terindikasi melakukan *tax shelter* (penghindaran pajak yang agresif) apabila nilai sanksi pajak SKPKB di atas nilai median dan perusahaan menerima ketetapan pajak dari regulator dan telah mendapatkan ketetapan final bagi perusahaan yang mengajukan keberatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan manajemen laba riil lewat diskresi arus kas operasi dan diskresi biaya produksi abnormal mendukung hipotesis penelitian bahwa keduanya meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Manajemen laba akrual menurunkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *aggressive tax shelter* (tidak sesuai prediksi). Adapun manajemen laba riil via diskresi beban abnormal tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas *aggressive tax shelter*. Temuan empiris ini diperkuat dengan hasil pengujian tambahan yang menunjukkan manajemen laba akrual, diskresi arus kas abnormal, dan diskresi arus kas produksi dapat digunakan secara bergantian (substitusi) maupun bersamaan (komplementer). Manajemen laba akrual dan diskresi arus kas abnormal bersifat substitusi dalam menaikkan (menurunkan) *aggressive tax shelter*; demikian pula penggunaan manajemen laba akrual dan biaya produksi abnormal. Adapun penggunaan arus kas abnormal dan biaya produksi abnormal bersifat komplementer dalam menaikkan *aggressive tax shelter*. Kedua teknik manajemen laba riil ini kemungkinan digunakan secara bersamaan oleh perusahaan dalam meningkatkan aktivitas *aggressive tax shelter*.

Implikasi penelitian ini adalah agar pengguna laporan keuangan, terutama pemegang saham dan investor, mewaspadai motivasi manajemen melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya

produksi. Tindakan tersebut kemungkinan akan merugikan perusahaan berupa pembayaran sanksi pajak akibat keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter* yang agresif berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak. Bagi regulator, dihimbau untuk mempublikasikan secara luas perusahaan yang melakukan kategori transaksi ilegal menurut ketentuan perpajakan. Informasi ini selain bermanfaat bagi perkembangan penelitian di bidang perpajakan Indonesia, juga memberikan edukasi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai konsekuensi kerugian apabila perusahaan terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu proksi yang digunakan untuk mengidentifikasi *tax shelter firms* tidak dianalisis terlebih dahulu apakah memiliki karakteristik yang sama dengan sampel *tax shelter firms* pada penelitian Wilson (2009) dan Lisowsky (2010). Kedua penelitian tersebut menggunakan data internal dari regulator untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter*, yaitu perusahaan yang melakukan kategori transaksi ilegal menurut ketentuan perpajakan. Data tersebut bersifat rahasia di Indonesia. Kedua, tidak dilakukan pengujian analisis sensitivitas untuk ukuran manajemen laba akrual dengan ukuran lain. Penelitian ini memilih menggunakan *Modified Jones* untuk mengukur manajemen laba akrual karena ukuran ini yang paling sering digunakan untuk menguji hubungan manajemen laba dan manajemen pajak (Frank et al. 2009; Wilson 2009; Lisowsky 2010; Samingun 2012).

Penelitian selanjutnya, selain mempertimbangkan keterbatasan penelitian yang dipaparkan di atas, mengidentifikasi komponen pembentuk perbedaan laba akuntansi dan pajak pada perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter* agar memperkaya analisis hasil penelitian. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi eksperimental guna mengkonfirmasi ulang hasil temuan pada penelitian ini yang menemukan kecenderungan perilaku perusahaan melaku-

kan manajemen laba dalam aktivitas *tax shelter*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dechow, P. M., R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70 (2), 193-225.
- Desai, A. M. and D. Dharmapala. 2011. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. Working Paper, USA.
- Frank, M. M., J. L. Lynch, and O. S. Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 467-496.
- Graham, R. J. and L. A. Tucker. 2006. Tax Shelters and Corporate Debt Policy. *Journal of Financial Economics*, 81, 563-594.
- Hanlon, M. 2005. The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book Tax Differences. *The Accounting Review*, 137-166.
- Hanlon, M. and S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hanlon, M. and S. Joel. 2009. What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economics*, 93, 126-141.
- Huseynov, F. and K. K. Bonnie. 2012. Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18, 804-827.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior; Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Kim, B. J., Y. Li., and L. Zhang. 2011. Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. *Journal of Financial Economics*, 100, 639-662.

- Lisowsky, P. 2010. Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters Using Financial Statement Information. *The Accounting Review*, 1693–1720.
- Roychowdhury, S. 2006. Earning Management Through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42, 335-370.
- Samingun. 2012. *Manajemen Laba untuk Tujuan Pajak: Determinan, Metode, dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Shackelford, D. A. and T. Shevlin. 2001. Empirical Tax Research in Accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 321-387.
- Shevlin, T. 2007. The Future of Tax Research: From an Accounting Professor's Perspective. *The Journal of the American Taxation Association*, 87.
- Tang, T. and M. Firth. 2011. Can Book–Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 175-204.
- Wilson, J. R. 2009. An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 969-999.